



**KEHIDUPAN  
PADA MASA PEMULIHAN:  
KASUS PEREMPUAN  
KORBAN KERUSUHAN SAMBAS  
DI KABUPATEN PONTIANAK**

Mita Noveria dan Haning Romdiati

### **Pendahuluan**

Konflik sosial antara etnis Madura dengan Melayu Sambas yang terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2000 telah berakibat pada terusirnya etnis Madura dari daerah atau tempat tinggal mereka. Semua penduduk etnis Madura, laki-laki dan perempuan, tua dan muda harus pindah ke tempat baru karena hingga kini etnis Melayu Sambas tidak lagi bersedia menerima mereka untuk kembali ke wilayah Sambas. Kenyataan ini menyebabkan etnis Madura yang sekarang sudah menempati lokasi pemukiman baru harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat di daerah baru untuk menjalani hidup seperti sedia kala, yaitu dapat hidup mandiri, tidak menggantungkan diri pada

bantuan-bantuan seperti ketika mereka masih berstatus sebagai pengungsi.

Masa pemulihan (*recovery*) setelah kerusuhan sosial merupakan masa yang berat bagi perempuan maupun laki-laki. Setelah porak poranda akibat kerusuhan yang melanda, korban kerusuhan berusaha untuk menata kembali kehidupan mereka. Keterbatasan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup membuat korban kerusuhan mengalami kesulitan untuk menjalani hidup layak, walaupun sekadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (pangan, pendidikan dan kesehatan). Untuk perempuan, khususnya, kesulitan ini semakin besar karena dengan berbagai 'keterbatasannya' (secara fisik maupun sosial), kerusuhan telah berdampak lebih buruk pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.<sup>1</sup>

Artikel ini membahas kehidupan perempuan pada masa pemulihan di lokasi pemukiman baru dengan fokus pada peran perempuan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga dan sosial kemasyarakatan, di samping juga melihat pemenuhan kebutuhan mereka atas pelayanan kesehatan reproduksi. Tulisan ini berdasarkan temuan penelitian tentang 'Penanganan Pengungsi Korban Kerusuhan Sambas' yang dilakukan oleh penulis bersama-sama anggota tim peneliti lainnya dari Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI pada tahun 2002 dan 2003.

### **Perempuan dan Kehidupan Ekonomi Rumah Tangga**

Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas telah menyebabkan korban jiwa. Sebagian kematian terjadi ketika 'perang' atau perkelahian antar kedua kelompok etnis berlangsung, namun sebagian lainnya terjadi di tempat-tempat pengungsian. Di antara korban meninggal terdapat laki-laki yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, sehingga pasca kerusuhan ditemukan rumah tangga-rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI di beberapa daerah relokasi pengungsi (Parit Bhakti Suci dan SP2 Tebang Kacang dan Sungai Pandan) terhadap 188 rumah tangga (959 jiwa) eks pengungsi Sambas memperlihatkan peningkatan yang cukup tajam pada perempuan yang berstatus kepala rumah tangga (lihat tabel). Namun demikian, peningkatan jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga ini tidak hanya karena kematian, karena beberapa di antaranya disebabkan

oleh perginya kepala rumah tangga ke daerah lain, terutama untuk mencari pekerjaan.

**Responden Menurut Status Dalam Rumah Tangga  
Sebelum dan Sesudah Kerusakan Sosial dan Jenis Kelamin (%)**

Status dalam rumah tangga	Sebelum kerusakan		Sesudah kerusakan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kepala rumah tangga	31,4	1,3	35,3	5,1
Istri/suami	0,5	32,8	0,6	33,5
Anak/menantu	60,8	58,0	56,1	55,9
Cucu	3,3	3,9	3,6	2,4
Orang tua/mertua	0,7	1,8	0,2	1,6
Keluarga Lain	3,1	2,2	3,9	1,4
Lainnya	0,2	0,0	0,2	0,0
Persentase	100,0	100,0	100,0	100,0
Jumlah Responden	574	543	467	492

Sumber: Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI, 2003.

Catatan: Jumlah anggota rumah tangga responden setelah kerusakan berkurang sebanyak 158 orang dari jumlah sebelum kerusakan.

Perubahan status dalam rumah tangga ini membawa konsekuensi terhadap kehidupan perempuan. Sebelum kerusakan kebanyakan dari mereka berperan dalam tugas-tugas domestik sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Jika terdapat sebagian di antaranya yang bekerja, pada umumnya mereka hanya sebagai pekerja keluarga yang sifatnya membantu suami. Namun demikian, setelah kerusakan keadaan ini mengalami perubahan. Kalau sebelumnya hanya berurusan dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, maka sekarang sebagian ibu rumah tangga juga bertanggungjawab dalam kegiatan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini ditemukan juga di berbagai negara lain yang mengalami konflik, termasuk konflik militer. Pasca konflik, tanggungjawab untuk mempertahankan kehidupan keluarga sering berpindah kepada perempuan karena kehilangan laki-laki yang sebelumnya memegang tanggung jawab tersebut, baik karena kematian maupun akibat kepergian mereka ke daerah lain (ICRC, 2003; IOM, 2003; Ochieng, 2001). Dengan

demikian, setelah kerusuhan berakhir beban yang harus diemban oleh perempuan menjadi berlipatganda.<sup>2</sup>

Perubahan peran dari pengurus rumah tangga menjadi pencari nafkah tidak hanya dialami oleh mereka yang kehilangan kepala rumah tangga laki-laki, melainkan juga oleh perempuan yang masih tinggal dengan keluarga utuh, dalam arti punya suami dan anak-anak yang tinggal serumah. Terbatasnya kesempatan berusaha bagi laki-laki telah memaksa perempuan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Kasus yang dialami oleh seorang perempuan etnis Melayu asal Desa Setinggak, Kecamatan Liku Paloh yang menikah dengan laki-laki etnis Madura dan terpaksa terusir dari tanah kelahirannya akibat kerusuhan mendukung argumen ini.

Sewaktu masih tinggal di Sambas Ibu Tina (sebut saja demikian) bekerja sebagai ibu rumah tangga karena suaminya adalah seorang wiraswasta (pedagang) yang sukses, sehingga mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan. Namun setelah hidup di daerah relokasi di Kabupaten Pontianak, suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap karena belum menemukan jenis usaha yang akan dilakukan atau

dikembangkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama setelah 'modal' yang mereka bawa dari daerah semakin menipis, ibu ini berinisiatif untuk membuat kerupuk yang kemudian dijual di daerah sekitar pemukiman. Meskipun tidak terlalu besar, kegiatan yang dilakukannya dapat diandalkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup

Daerah relokasi pengungsi di Satuan Pemukiman Desa  
Tebang Kacang, Kec. Sui Raya, Kab. Pontianak



Doc. YIP

keluarga. Di samping membuat kerupuk, ibu ini juga bercocok tanam di halaman rumah mereka dengan menanam tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi keluarga, sehingga pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makan dapat dikurangi. Meskipun tidak diperoleh

data empiris mengenai jumlah mereka yang mengalami perubahan peran ini, wawancara dengan beberapa narasumber mendapatkan bahwa fenomena ini cukup banyak ditemui di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Kasus serupa dialami pula oleh keluarga-keluarga lainnya yang tinggal di daerah pemukiman yang terletak di sekitar pabrik (Sungai Pandan).

Banyak ibu rumah tangga yang bekerja di pabrik-pabrik (pengolahan udang dan biskuit) karena suami mereka tidak mempunyai penghasilan tetap. Bagi sebagian keluarga, keterlibatan perempuan dalam bekerja ini bahkan menjadi tumpuan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Anak-anak perempuan juga tidak luput dari peran ekonomi ini. Setelah pendidikan mereka terganggu sejak kerusuhan meletus sampai pindah ke tempat tinggal baru, banyak yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini, terutama yang berusia belasan sampai awal atau pertengahan 20-an, kemudian bekerja ke kota, melakukan berbagai jenis pekerjaan. Sebagian bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Pontianak, di Malaysia, dan sebagian lainnya bekerja sebagai pelayan toko atau restoran di Pontianak. Hal ini dilakukan untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sebagian pendapatan yang diperoleh diberikan kepada orang tua, sebagaimana dikatakan oleh seorang narasumber berikut ini.

“... dulu anak-anak kami semua sekolah, jarang yang kerja. Tapi sekarang hidup susah, tak ada kerja, anak mau sekolah tak ada uang, kalau ingat itu mau nangis rasanya. Sekarang anak-anak perempuan bekerja bantu orang tua, jadi pembantu di Pontianak, ada yang ke Malaysia. Dulu tak ada, jarang sekali yang kerja jadi pembantu”.

Pasca kerusuhan, banyak perempuan bekerja mengalami perubahan jenis pekerjaan. Di daerah asalnya, mayoritas perempuan yang menjadi korban kerusuhan bekerja di bidang pertanian atau perkebunan. Di samping bercocok tanam tanaman pangan, banyak di antara mereka yang bekerja menoreh getah pohon karet, baik di kebun milik sendiri maupun di kebun orang lain. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dapat lagi mereka lakukan di daerah tempat tinggal baru, khususnya bagi

perempuan yang berasal dari keluarga-keluarga yang memilih pola 'pemberdayaan'<sup>3</sup>. Sejumlah uang yang diterima dari pemerintah hanya dapat digunakan untuk membeli rumah di lahan pekarangan yang sempit. Akibatnya, mereka tidak mempunyai lahan pertanian yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Menyasiasi keadaan ini, perempuan-perempuan (ibu rumah tangga dan mereka yang belum menikah) mengubah pekerjaan, sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia. Karena di sekitar tempat tinggal mereka terdapat beberapa pabrik yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan, maka banyak di antara perempuan bekerja di pabrik-pabrik tersebut sebagai buruh. Hal ini dimungkinkan karena pekerjaan yang dilakukan tidak menuntut keterampilan tinggi, misalnya mengupas udang di pabrik pengolahan udang. Selanjutnya, beberapa rumah tangga membuka usaha warung dan kebanyakan dijalankan oleh perempuan. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang tinggal di lokasi pemberdayaan, melainkan juga oleh mereka yang menempati daerah relokasi (pola pertanian dan jasa).

### **Perempuan dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Reproduksi**

Hak-hak perempuan untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kebutuhan pelayanan sosial dasar, terutama pelayanan kesehatan sering terabaikan, sebagaimana telah dihadapi oleh perempuan-perempuan korban berbagai konflik, termasuk oleh para perempuan korban perang (Walsh, 1997). Perempuan korban kerusakan cenderung tidak mempunyai pilihan karena keadaan mereka memaksa untuk menerima hanya sedikit bantuan, sementara kesempatan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan terdekat juga sangat terbatas akibat ketidakmampuan ekonomi.

Sejak di tempat pengungsian hingga pindah ke lokasi permukiman yang permanen, bantuan pelayanan kesehatan yang diberikan pada penduduk korban kerusakan sering tidak memperhatikan secara khusus kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi. Kebutuhan akan jenis pelayanan kesehatan reproduksi bukan hanya terkait dengan pelayanan kehamilan dan persalinan, tetapi juga pelayanan keluarga berencana.

Hingga kira-kira tiga tahun tinggal di daerah baru (khususnya di tempat relokasi yang berjumlah 16 tempat), hanya ada satu puskesmas pembantu di daerah Tebang Kacang yang telah aktif memberikan

pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi. Pelayanan kesehatan reproduksi lain yang dapat diakses cukup baik oleh pengungsi adalah pelayanan yang diberikan di pos bersalin desa (polindes). Bangunan dan peralatan yang dimiliki polindes ini merupakan bantuan dari salah satu LSM internasional yang bergerak di bidang kesehatan yaitu International Medical Center (IMC). Namun dari semua polindes bantuan IMC hanya ada dua yang berfungsi dengan baik, yaitu di tempat relokasi Parit Bhakti Suci yang terletak dekat dengan kota Pontianak dan satu Polindes lain terdapat di tempat relokasi Sumber Bahagia.

Keterbatasan pelayanan kesehatan di tempat-tempat relokasi menyebabkan para perempuan korban kerusuhan harus mencari pelayanan kesehatan reproduksi di luar lokasi yang tidak jarang memerlukan biaya transportasi cukup mahal, disamping waktu perjalanan yang cukup lama. Akibatnya, hanya sebagian kecil perempuan yang mampu memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi, sebagian besar lainnya terpaksa hanya bisa menggunakan tenaga dukun untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan.

Kebutuhan akan pelayanan keluarga berencana menjadi masalah serius bagi sebagian besar perempuan pada masa pemulihan. Jika pada awal penempatan di permukiman permanen (daerah relokasi), sebagian perempuan korban kerusuhan memanfaatkan akses pelayanan keluarga berencana yang diberikan oleh beberapa IMC, tetapi saat ini bantuan tersebut tidak lagi diberikan. Pada waktu itu, selain pelayanan kesehatan reproduksi IMC juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat korban kerusuhan berupa pengobatan gratis dengan cara 'jemput bola', yaitu mendatangi tempat relokasi melalui kegiatan pelayanan klinik keliling (*mobile clinic services*), penyuluhan dan pelatihan kader untuk mengidentifikasi kasus-kasus kesehatan yang harus dirujuk ke rumah sakit, mendistribusikan obat-obat untuk penyakit ringan dan merujuk pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi, LSM internasional tersebut telah merujuk kasus kanker rahim ke rumah sakit di Kota Pontianak. Namun, permasalahan muncul ketika pihak rumah sakit tidak bersedia memberikan pelayanan cuma-cuma kepada perempuan korban kerusuhan yang tergolong penduduk miskin hanya karena pasien tidak

memiliki kartu sehat. Pada kenyataannya, kartu sehat tidak bisa dimiliki oleh para korban kerusuhan karena hingga kini mereka tidak memiliki kartu identitas penduduk sebagai persyaratan untuk mendapatkan kartu tersebut.

Kenyataan ini merupakan gambaran dari keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi di kalangan perempuan korban kerusuhan sosial yang semestinya bisa dihindari jika pihak-pihak yang berwenang menangani masyarakat korban kerusuhan dapat saling bekerjasama.<sup>4</sup> Apalagi pada masa sekarang dimana program bantuan dari LSM sudah dialihkan dari bantuan yang sifatnya emergensi atau tanggap darurat ke bantuan untuk mendukung pelayanan Puskesmas Pembantu dan Polindes. Walaupun bantuan tetap akan berjalan, tetapi karena sarana-prasarana kesehatan tersebut sangat terbatas jumlahnya, maka diperkirakan cukup banyak perempuan korban kerusuhan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi pada masa pemulihan.

### **Perempuan dan Upaya Memperoleh Kembali Harta yang Ditinggalkan**

Kerusuhan sosial menyebabkan perempuan harus terpisah dengan keluarga dekatnya. Di antara etnis Madura yang terusir dari wilayah Sambas, terdapat perempuan-perempuan Melayu Sambas yang juga terpaksa meninggalkan keluarga besarnya untuk mengikuti suami yang ber-etnis Madura. Walaupun tidak memiliki resiko untuk dibunuh, tetapi perempuan-perempuan etnis Melayu yang berstatus sebagai isteri orang Madura harus memilih antara tetap tinggal di Sambas tetapi harus berpisah dengan suami dan anak-anaknya atau meninggalkan keluarganya.

Oleh karena itu, baik di tempat-tempat relokasi maupun pola pemberdayaan, cukup banyak ditemukan perempuan etnis Melayu. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka untuk tinggal bersama orang-orang Madura karena selain ada suami dan anak, mereka telah hidup berdampingan cukup lama dengan orang Madura. Dan selama ini pula tidak pernah terjadi tindakan yang membahayakan jiwa para perempuan etnis Melayu. Di pihak lain, yaitu di kalangan orang Madura, keberadaan perempuan Melayu sangat membantu untuk memperoleh kembali harta yang mereka tinggalkan di Sambas.



Pada umumnya, harta yang tersisa milik para korban kerusuhan Sambas adalah lahan pertanian (sawah, lahan kering, dan pekarangan) cukup luas, rata-rata mencapai 2 hektar. Menyadari sangat sulit untuk bisa kembali menetap di Sambas, banyak di antara orang Madura yang ingin menjual tanah tersebut. Namun, karena tidak mungkin datang sendiri ke Sambas, sebagian mereka meminta bantuan isteri atau para perempuan lain yang beretnis Melayu Sambas sebagai perantara untuk menjual tanah. Hal ini karena perempuan Sambas diperbolehkan untuk mengunjungi sanak saudara atau kerabat mereka di Sambas untuk beberapa waktu.

Mereka bisa menggunakan kesempatan itu untuk menawarkan tanah milik suami atau tetangga etnis Madura yang akan dijual. Transaksi jual-beli tanah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan sekali-dua kali kunjungan. Oleh karena itu, perempuan etnis Melayu cukup memiliki peran penting dalam usaha jual beli tanah, bahkan untuk beberapa kasus ditemukan adanya perempuan etnis Melayu yang menjadikan perantara jual-beli tanah sebagai pekerjaan sampingan. Kenyataan ini semakin jelas menunjukkan fenomena pentingnya peran perempuan dalam membantu ekonomi rumah tangga pada masa pemulihan.

### Penutup

Kehidupan berat pasca kerusuhan menghadang korban kerusuhan Sambas yang sudah menempati pemukiman baru di wilayah Kabupaten Pontianak. Kesulitan ekonomi, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan hidup merupakan salah satu persoalan berat yang harus dihadapi. Selain itu, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalani hidup layak juga sangat terbatas. Hal ini semakin menambah kesulitan dalam membangun kembali kehidupan yang telah terganggu akibat kerusuhan.

Pada masa pemulihan, perempuan telah memainkan peran yang sangat berarti dalam keluarga. Tidak hanya menjalankan tugas-tugas domestik yang selama ini menjadi tanggungjawab mereka, banyak perempuan juga menjalankan peran sebagai pencari nafkah agar kehidupan keluarga dapat dipertahankan. Berbagai faktor menyebabkan 'bertambahnya' peran perempuan ini, antara lain ketidakhadiran laki-laki dalam keluarga, baik karena meninggal maupun karena tinggal di tempat terpisah serta tidak adanya mata pencaharian tetap yang dimiliki

laki-laki. Pada beberapa kasus keterlibatan ini tidak saja untuk menambah penghasilan, melainkan sebagai gantungan utama kehidupan ekonomi keluarga.

Mengacu pada kondisi di atas, ada satu pertanyaan yang muncul, apakah peran di sektor publik yang telah dilakukan oleh perempuan membawa konsekuensi pada peran dan posisi mereka dalam rumah tangga? Nampaknya jawaban yang muncul cenderung "tidak", karena sebagian besar dari mereka masih memegang peran utama untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Artinya, tanggungjawab untuk pekerjaan-pekerjaan domestik masih ada pada pundak perempuan.

Selain itu, perluasan peran ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana yang mendukung kehidupan perempuan. Memperoleh pelayanan kesehatan, terutama untuk kesehatan reproduksi, merupakan kemewahan yang sulit diperoleh perempuan. Meskipun pelayanan kesehatan diperlukan oleh semua penduduk tanpa terkecuali, namun karena kebutuhannya yang khusus seperti untuk pelayanan kontrasepsi keluarga berencana dan persalinan, perempuan menjadi pihak yang lebih membutuhkan sarana pelayanan ini. Mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan ini, maka penyediaan sarana pelayanan kesehatan (reproduksi) tidak dapat ditunda lagi agar kehidupan yang layak bagi perempuan dapat diwujudkan.

### Catatan Belakang

- <sup>1</sup> Lihat tulisan Rosnani Sahardin, "Sudahkah Status Perempuan itu Berubah?", tulisan Nuhdiatul Huda Mangun, "Perempuan Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Pasca Konflik (Kerusuhan) Poso", dan tulisan Eko Bambang Subiyantoro, "Perempuan di Wilayah Konflik Maluku 'Menakar Hidup di Ladang Bedil'" dalam *Jurnal Perempuan* No. 24, Jakarta Juli 2002 yang menyajikan fakta di berbagai daerah kerusuhan tentang lebih buruknya dampak kerusuhan terhadap perempuan daripada laki-laki.
- <sup>2</sup> Lihat juga tulisan Nuhdiatul Huda Mangun, "Perempuan Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Pasca Konflik (Kerusuhan) Poso", *Jurnal Perempuan* No. 24, Jakarta Juli 2002, hal. 35-62.
- <sup>3</sup> Pemerintah menetapkan penanganan pengungsi melalui 3 tiga pola, yaitu (1) pulang ke daerah tempat tinggal semula, (2) relokasi ke tempat tinggal baru melalui program transmigrasi (pola pertanian dan jasa) serta (3) pemberdayaan. Pola pertama tidak diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Barat karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan pengungsi pulang ke daerah tempat tinggal sebelum kerusuhan. Pola kedua dibedakan menjadi dua, yaitu transmigrasi pertanian dan jasa. Mereka yang

mengikuti pola transmigrasi pertanian memperoleh lahan untuk perumahan dan lahan pertanian, sedangkan transmigrasi pola jasa hanya memperoleh lahan perumahan. Pola terakhir dilakukan dengan memberi sejumlah uang (Rp. 5.000.000,-) kepada pengungsi dan membebaskan mereka untuk memilih lokasi tempat tinggal sendiri. Berbeda dengan pola transmigrasi, setelah memperoleh uang tersebut tidak ada lagi hak yang akan dituntut dari pemerintah.

- Adanya ego kewenangan berkaitan dengan pendanaan tampaknya merupakan salah satu penyebab buruknya layanan kesehatan bagi korban kerusuhan masa pemulihan. Dana dekonsentrasi yang dilimpahkan ke provinsi tidak banyak dimanfaatkan untuk upaya penyediaan tenaga medis/paramedis di tempat-tempat pelayanan yang belum ada tenaganya (yaitu di Puskesmas dan Polindes bantuan LSM), utamanya karena tanggung jawab penyediaan tenaga kesehatan ada di tingkat kabupaten. Sebaliknya, alasan dari pemda kabupaten untuk tidak/belum menugaskan tenaga kesehatan di tempat-tempat relokasi pengungsi adalah karena belum ada penyerahan pengungsi secara resmi dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat ke Pemda Kabupaten Pontianak. Terkait dengan ini, tampaknya aspek sosialisasi dan keterbukaan dalam implementasi program dari pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan agar penanganan korban kerusuhan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

## Daftar Bacaan

- ICRC, 2003. *Women Facing War: ICRC Study on Women Affected by Armed Conflict*, <http://www.icrc.org>.
- IOM, 2001. *IOM Note on Women and Post-conflict Social Reconstruction: Healing the Wounds*. <http://www.reliefweb.int/library>.
- Mangun, Nuhdiatul Huda. 2002. "Perempuan Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Pasca Konflik (Kerusuhan) Poso" *Jurnal Perempuan* No. 24, Jakarta.
- Ochieng, Ruth Ojiambo, 2001. "The Impact of Armed Conflict on Womens Economic Empowerment: The African Experience". Paper dipresentasikan pada *The Networking Conference*, Botswana, 17-24 November. <http://www.isis.or.ug>.
- Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kerusuhan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat dan Maluku Utara*. Laporan Penelitian. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI.
- Saharudin, Rosnani. 2002. "Sudahkan Status Perempuan itu Berubah?" *Jurnal Perempuan* No. 24, Jakarta.
- Subiyantoro, Eko Bambang. 2002. "Menakar Hidup di Ladang Bedil". *Jurnal Perempuan*, No. 24, Jakarta.
- Walsh, Martha. 1997. *Post-conflict Bosnia and Herzegovina: Integrating Women's special situation and gender perspective in skills training and employment promotion programmes*. Geneva: Training Policies and Systems Branch, Employment and Training Department. International Labour Office.

